



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

URAIAN	CAT	TAHUN ANGGARAN 2023		%	TAHUN ANGGARAN 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
A. PENDAPATAN	5.1.1				
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1				
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	71.213.298.828,00	67.829.112.388,92	95,25%	45.407.125.436,02
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	12.447.813.040,00	8.533.083.042,00	68,55%	8.208.584.693,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	2.300.000.000,00	2.398.005.508,00	104,26%	2.114.662.284,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.4	71.215.278.120,00	69.780.328.059,30	97,99%	52.592.154.310,13
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		157.176.389.988,00	148.540.528.998,22	94,51%	108.322.626.723,15
PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERimbangan	5.1.1.2.1				
Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	115.172.266.859,00	100.172.266.859,00	86,98%	87.597.180.127,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.1.2.1.2	286.490.979.370,00	265.590.979.370,00	92,70%	114.397.541.000,00
Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.3	679.644.550.000,00	678.915.439.397,00	99,89%	642.058.489.477,00
Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.1.4	301.645.067.145,00	288.002.840.784,00	95,48%	219.962.859.685,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		1.382.952.863.374,00	1.332.681.526.410,00	96,36%	1.064.016.070.289,00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.1.1.2.2				
Dana Insentif Daerah (DID)	5.1.1.2.2.1	10.513.250.000,00	13.493.601.500,00	128,35%	25.497.828.000,00
Dana Desa	5.1.1.2.2.2	139.870.726.000,00	139.870.726.000,00	100,00%	137.819.413.000,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		150.383.976.000,00	153.364.327.500,00	101,98%	163.317.241.000,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat		1.533.336.839.374,00	1.486.045.853.910,00	96,92%	1.227.333.311.289,00
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	5.1.1.2.3				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.3.1	134.918.205.000,00	155.121.779.862,00	114,97%	127.638.303.816,00
Bantuan Keuangan Provinsi	5.1.1.2.3.2	56.676.149.668,00	55.981.160.268,00	98,77%	21.552.875.000,00
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi		191.594.354.668,00	211.102.940.130,00	110,18%	149.191.178.816,00
Jumlah Pendapatan Transfer		1.724.931.194.042,00	1.697.148.794.040,00	98,39%	1.376.524.490.105,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.3				
Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	131.724.663,00	124.574.663,00	94,57%	92.490.092.646,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah		131.724.663,00	124.574.663,00	94,57%	92.490.092.646,00
TOTAL PENDAPATAN		1.882.239.308.693,00	1.845.813.897.701,22	98,06%	1.577.337.109.474,15
B. BELANJA	5.1.2				
BELANJA OPERASI	5.1.2.1				
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	673.793.662.760,00	603.842.271.673,00	89,62%	596.925.726.030,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	539.077.413.802,00	532.662.237.285,95	98,81%	461.026.180.627,70
Belanja Hibah	5.1.2.1.3	71.162.846.960,00	57.407.324.181,00	80,67%	49.448.489.040,44
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.4	1.065.000.000,00	1.009.100.000,00	94,75%	1.527.191.375,00
Jumlah Belanja Operasi		1.285.098.923.522,00	1.194.920.933.139,95	92,98%	1.108.927.587.073,14
BELANJA MODAL	5.1.3				
Belanja Tanah	5.1.3.1	0,00	0,00	0,00%	149.670.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.3.2	61.239.868.857,00	50.670.206.258,00	82,74%	66.006.237.949,50
Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.3.3	66.316.975.890,00	64.342.140.106,00	97,02%	89.832.903.897,07
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.3.4	237.391.301.733,00	235.512.051.262,00	99,21%	85.881.648.940,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.3.5	9.778.673.823,00	6.038.713.964,00	61,75%	2.177.586.304,00
Belanja Aset Lainnya	5.1.3.6	80.000.000,00	78.962.000,00	98,70%	0,00

URAIAN	CAT	TAHUN ANGGARAN 2023		%	TAHUN ANGGARAN 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
Jumlah Belanja Modal		374.806.820.303,00	356.642.073.590,00	95,15%	244.048.047.090,57
BELANJA TAK TERDUGA	5.1.4				
Belanja Tak Terduga	5.1.4.1	9.335.520.000,00	9.153.526.845,00	98,05%	26.553.965.877,00
Jumlah Belanja Tak terduga		9.335.520.000,00	9.153.526.845,00	98,05%	26.553.965.877,00
TRANSFER	5.1.5				
Bagi Hasil Pajak ke Desa	5.1.5.1	8.436.611.187,00	7.205.792.096,00	85,41%	6.664.212.649,00
Belanja Bantuan Keuangan	5.1.5.2	248.001.505.623,00	248.001.478.441,00	100,00%	230.336.427.214,00
Jumlah Transfer		256.438.116.810,00	255.207.270.537,00	99,52%	237.000.639.863,00
TOTAL BELANJA		1.925.679.380.635,00	1.815.923.804.111,95	94,30%	1.616.830.239.903,71
C. SURPLUS/DEFISI	5.1.6	- 43.440.071.942,00	29.890.093.589,27	-68,81%	- 39.193.130.429,56
D. PEMBIAYAAN	5.1.7				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.7.1				
Penggunaan SILPA Tahun Lalu	5.1.7.1.1	44.440.071.942,00	44.433.516.941,81	99,99%	83.633.202.371,37
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.7.1.2	0,00	1.000.000,00	0,00%	0,00
Total Penerimaan		44.440.071.942,00	44.434.516.941,81	99,99%	83.633.202.371,37
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.7.2				
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.7.2.1	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00%	0,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	5.1.7.2.2	0,00	0,00	0,00%	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.7.2.1	0,00	0,00	0,00%	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.7.2.1	0,00	0,00	0,00%	0,00
Total Pengeluaran		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00%	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		43.440.071.942,00	43.434.516.941,81	99,99%	83.633.202.371,37
E. SISA LEBIH PERHITUNGAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN	5.1.8	0,00	73.324.610.531,08		44.440.071.941,81

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini


BUPATI ROKAN HULU,

H. SUKIMAN



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI RIAU**

Jln. Jend Sudirman Nomor 721 Pekanbaru, Riau 28282 Telepon 0761- 856464 Faksimile 0761- 858787

Pekanbaru, 22 Mei 2024

Nomor : 22.B/S-HP/XVIII.PEK/05/2024
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan
Hulu Tahun 2023

**Kepada Yth.
Bupati Rokan Hulu
di
Pasir Pengaraian**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini atas Laporan Keuangan Pemerinth Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 adalah Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain sebagai berikut.

- a. Kesalahan Penganggaran Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal pada 24 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- b. Mekanisme Pemungutan Retribusi Pemakaian Alat Berat belum Didukung dengan Perjanjian Tertulis dan Kartu Kendali yang Memadai, dan
- c. Kekurangan Volume Pekerjaan dan Ketidaksesuaian Harga Satuan Pada Empat Belas Paket Pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Rokan Hulu, antara lain agar memerintahkan:

- a. 24 Kepala SKPD untuk mengevaluasi ketepatan klasifikasi jenis belanja barang dan jasa dan belanja modal pada anggaran tahun berikutnya dan melaporkan hasilnya kepada Bupati;
- b. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) peminjaman alat berat yang antara lain mengatur tentang proses perjanjian sewa, serah terima penyerahan dan pengembalian, perpanjangan masa sewa, proses pemeliharaan/perbaikan alat berat pada masa sewa dan sanksi denda atas pemakaian yang melewati batas waktu; dan
- c. Kepala Dinas Perkim untuk memproses kekurangan volume sebesar Rp76.949.887,69 dan menyetorkannya ke rekening Kas Daerah.

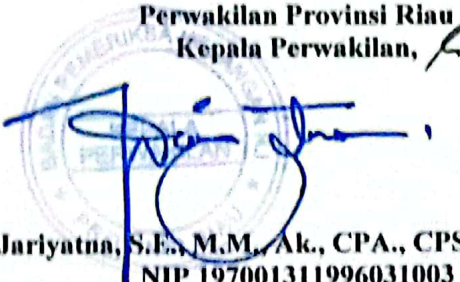
Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 22.A/LHP/XVIII.PEK/05/2024 tanggal 21 Mei 2024 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 22.B/LHP/XVIII.PEK/05/2024 tanggal 21 Mei 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Rokan Hulu, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Riau
Kepala Perwakilan, 


Jariyatna, S.E., M.M., Ak., CPA., CPSAK, CSFA
NIP 197001311996031003